

OPTIMALISASI BUMDES MALALUWILIN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAMPUNG TELUK DORE DISTRIK MAKBON KABUPATEN SORONG

Wahyudin Halik¹; Lukman Rais²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sorong

wahyudin.halik@gmail.com; lukmanrais28@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi BUMDES Malaluwilin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Teluk Dore Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penentuan informan adalah dengan *Snowball Sampling*, dimana informan penelitian ini adalah pengelola BUMDES, lalu ke Kepala Kampung yang mewakili pemerintah kampung dan masyarakat setempat yang mengetahui aktivitas dari BUMDES. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan dengan analisis data data kualitatif yang dimulai dari mereduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan masalah yang dihadapi oleh BUMDes Malaluwilin adalah tidak ada system pelaporan yang akuntabel sehingga pengelolaan yang tidak profesional dimana pengurus tidak memiliki pelaporan yang detail terhadap omzet, biaya operasional dan keuntungan yang di dapat. Diperlukan peningkatan kapasitas manajerial agar usaha dapat berkembang dengan baik. Serta masalah selanjutnya belum terlaksananya pelatihan pada masyarakat yang dapat meningkatkan kreatifitas sehingga mendorong perkembangan usaha. Dalam kesejahteraan masyarakat sudah berperan baik, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal masih diperlukan inovasi dalam kegiatan usahanya supaya menarik masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan usaha desa ini.

Kata Kunci : Optimalisasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan wajar sehingga dengan tujuan tersebut kondisi kehidupan masyarakat diharapkan akan membaik yang pada akhirnya tatanan sosial ekonomi dan budaya akan maju dan berkembang secara terus menerus. Pada Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah tahun 2014 memberikan sebuah kewenangan kepada daerah untuk mengatur

daerahnya sendiri yang biasa disebut otonomi daerah. Dalam otonomi tersebut pemerintahan daerah mendelegasikan sebagian kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut. Dalam upaya mewujudkan kepentingan masyarakat, setiap daerah diberikan hak untuk meningkatkan potensi yang berada di wilayah tersebut seperti dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di daerah secara

efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya pembangunan daerah lebih merata.

Fokus pembangunan daerah adalah pada seluruh wilayah, bukan hanya kota yang terkesan menciptakan perbedaan yang jauh sehingga melahirkan ketimpangan sosial. Dalam pembangunan yang menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah telah menfokuskan pembangunan desa sejak Indonesia merdeka, namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan perubahan zaman, yang meskipun telah dilaksanakan pembangunan di desa akan tetap tertinggal dari pembangunan di kota. Sehingga dibutuhkan strategi yang komprehensif dalam membangun wilayah yang menciptakan pemerataan, baik perkotaan maupun pedesaan.

Pembangunan pedesaan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Pembangunan di pedesaan pada dasarnya merupakan usaha mengembangkan perekonomian masyarakat desa sehingga

meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, serta meningkatkan kesadaran kepada masyarakat desa akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan pembangunan desa adalah sebuah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga tujuan dari pembangunan desa adalah memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan nasional. Otonomi desa dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa. Salah satu usaha desa untuk memperoleh dana sendiri adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Lukmawati, Puspaningtyas, and Rochim 2020).

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki maksud untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa (Pemerintah RI 2016). Dalam proses pengentasan kemiskinan dan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan memanfaatkan potensi alam yang ada diperlukan peran aktif dari pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa.

Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda seperti potensi sumber daya alam, kebudayaan dan industri lokal desa. Faktanya potensi yang dimiliki oleh setiap desa tidak sebanding dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat untuk mengelola potensi yang ada. Ketidakmampuan masyarakat desa

untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki menjadikan kurang sejahtera dan tertinggal. Ketidakmampuan itu seperti permasalahan ekonomi karena rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil bahkan cenderung subsistem; akses pendanaan yang terbatas; kurang memiliki akses pasar dan nilai tawar yang rendah; kurang memiliki pengetahuan mengenai cara produksi yang baik; sarana dan prasarana belum mendukung input produksi, proses produksi, dan pasca-produksi (Nurhayati et al. 2018).

Potensi pada masyarakat desa yang mampu memberikan manfaat ekonomi belum maksimal karena sumber daya kurang memberikan manfaat yang disebabkan kualitas sumber daya yang rendah sehingga kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara optimal tidak maksimal. Sehingga melihat hal tersebut diperlukan optimalisasi potensi desa agar sumber daya yang tersedia dapat menghasilkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Optimalisasi yang dilakukan untuk meningkatkan manfaat potensi.

Optimalisasi potensi desa dapat dilakukan melalui pengembangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUM Desa merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa melalui dukungan pemerintah yang bertugas menyusun perencanaan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi desa secara efektif dan efisien (Hasirun 2020).

Kabupaten Sorong merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari 30 kecamatan, 26 kelurahan, dan 226 desa. Pada tahun 2022 jumlah penduduknya mencapai 121.963 jiwa dengan luas wilayah 6.544,23 km² dan sebaran penduduk 18 jiwa/km². Dengan luas daerah tersebut sesungguhnya menjadi tantangan dari pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dimana 26,34 persen penduduk Kabupaten Sorong berada pada garis kemiskinan. Jika melihat rentang tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami trend peningkatan, dimana tahun 2020 sebesar 24,89 persen dan tahun 2021 sebesar 25,93 persen (BPS Kabupaten Sorong 2022). Melihat hal tersebut diperlukan upaya maksimal

dalam pengentasan kemiskinan demi mensejahterakan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan dengan pembentukan usaha kolektif di masyarakat setempat, salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga telah dibentuk di Kampung Teluk Dore Distrik Makbon Kabupaten Sorong untuk memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako), alat perbengkelan dan perlengkapan rumah tangga yang selama ini menjadi kebutuhan yang sangat penting karena Kampung Teluk Dore merupakan salah satu kampung yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten. Sebelum Badan Usaha Milik Desa ini terbentuk, praktis masyarakat harus keluar karena fasilitas dan toko kebutuhan bahan pokok dan lainnya, baik di Distrik maupun kampung disekitarnya masih sangat terbatas sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbentuk di Kampung Teluk Dore ini bernama Malaluwilin pada bulan April 2022 berstatus milik

pemerintah kampung atas usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANG) yang selanjutnya menjadi atensi pemerintah kampung untuk segera dibentuk dengan membangun toko bahan pokok yang diresmikan pada Juni 2022. Namun status BUMDes Kampung Teluk Dore saat ini semenjak bulan April 2023 tidak lagi aktif karena konflik yang terjadi atas pengelolaan keuangan dan kepemimpinan sehingga BUMDes ini tidak optimal. Sehingga tujuan awal utama pembentukan BUMDes yang diinisiasi dari pemerintah kampung ini yang sangat baik tetapi melahirkan konflik kepentingan atas pengelolaan dan menyisakan persoalan manajerial di pengurus yang berdampak tidak terjadinya transparansi pengelolaan keuangan.

Tujuan utama pembentukan BUMDes supaya masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, terus tumbuh, sehingga dapat berkembang dan memajukan kondisi ekonomi. Jika BUMDes ini termasuk bagus maka pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung Teluk Dore akan merata, tetapi hal itu tidak mampu

merubah kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan angka kemiskinan di Kampung Teluk Dore. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Teluk Dore yang menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak mengalami perubahan atau jumlahnya tetap yakni sebanyak 20 dari 42 kepala keluarga miskin. Jika melihat besaran Omzet dan Asset yang diperoleh BUMDes sebesar Rp 210.000.000,- seharusnya BUMDES ini dapat membantu mengatasi permasalahan kemiskinan di Kampung Teluk Dore dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang mudah dijangkau dan subsidi dari pemerintah kampung. Sehingga dalam penelitian ini akan dianalisis lebih jauh terkait optimalisasi BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Teluk Dore Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Apakah keberadaan BUMDes ini mampu menuntaskan masalah kesejahteraan masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat serta apakah keberadaan BUMDes ini

berperan optimal sehingga berperan baik dalam mengubah kondisi masyarakat lebih baik.

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahamai fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2018). Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian". Dalam penelitian deskriptif fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya (Arikunto 2010). Penggunaan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang pengelolaan

BUMDes dalam mengoptimalkan potensinya, sehingga lokasi penelitian berada Kampung Teluk Dore Distrik Makbon Kabupaten Sorong.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan *Snowball Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar ibarat bola salju menggelinding yang lama-lama menjadi besar (Sugiyono 2012). Informan dalam penelitian ini adalah pengelola BUMDES, lalu ke Kepala Kampung yang mewakili pemerintah kampung dan masyarakat setempat yang mengetahui aktivitas dari BUMDes. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dimulai dari mereduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada optimalisasi BUMDes Kampung Teluk Dore dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika

optimalisasi BUMDes dilakukan apakah dapat merubah kesejahteraan masyarakat setempat, yang mana BUMDes memiliki unit usaha yang merupakan potensi terbesar, yaitu unit toko kebutuhan pokok masyarakat. Meskipun baru dibentuk pada tahun 2022 namun toko ini mampu memberikan pemasukan pada PAD kampung dan menjadi ikon Kampung Teluk Dore. Untuk hasil unit toko yang dikelola oleh BUMDes mencapai lima ratus ribu perhari. Maka saat ini BUMDes Malaluwilin lebih berfokus pada pengelolaan toko kebutuhan sebagai bentuk pengoptimalan yang mampu mensejahterakan masyarakat.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Malaluwilin Kampung Teluk Dore

Pembentukan BUMDes Malaluwilin telah diatur dalam peraturan Kampung Teluk Dore pada tahun 2022 tentang pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) di Kampung Teluk Dore Distrik Makbon Kabupaten Sorong sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 87 diatur bahwa “(1) desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa

yang disebut BUMDes, (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, (3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Pemerintah RI 2016). Kegiatan BUMDes Malaluwilin dalam kegiatannya menggunakan transaksi yang sederhana dan sebelumnya telah disediakan tempat khusus untuk menjalankan usaha yang berbentuk toko sehingga menjadi pusat kebutuhan masyarakat.

Pengurus BUMDes Malaluwilin telah menyusun struktur organisasi dan AD/ART dengan baik sesuai kesepakatan bersama yang dilakukan oleh perangkat Kampung serta Pengurus yang ditunjuk. AD/ART tersebut disepakati digunakan untuk panduan kegiatan selama lima tahun selanjutnya. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Malaluwilin sebagai wujud untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang sebelumnya jika harus melengkapi kebutuhannya harus ke ibu kota kabupaten yang jaraknya 30 kilometer. Dalam upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat Kampung Teluk Dore, BUMDES ini bergerak dalam bisnis toko bahan pokok, alat pecah belah untuk kebutuhan rumah tangga dan peralatan perbengkelan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BUMDes Malaluwilin menjelaskan perkembangan usaha sejak Juni 2022 hingga Januari 2023 sedikit demi sedikit sudah mengalami peningkatan, namun memasuki bulan April 2023 mulai terkendala karena tidak maksimalnya kinerja pegawai yang telah direkrut dan konflik internal dalam pengurus yang dalam tahun ini telah berganti bendahara. Sehingga pada awal berdirinya sangat optimal dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, tetapi dari bulan April 2023 BUMDES ini tidak lagi beraktivitas sehingga membuat masyarakat harus bersusah payah dalam memenuhi kebutuhannya karena harus ke Distrik dan ibu Kota Kabupaten. Keberadaan BUMDES Malaluwilin saat ini tidak optimal karena terkendala modal dan sumber daya manusia yang dirasa masih belum mampu mengelola BUMDes, yang terbukti pada tidak beroperasinya lagi kegiatan yang seharusnya secara terus

menerus dilakukan. Sehingga dalam pengelolaannya pemerintah Kampung Teluk Dore harus memberikan perhatian besar terhadap usaha milik kampung ini melihat manfaat keberadaannya BUMDes Malaluwilin belum dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat kampung.

Hal ini bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Safrieta Jatu Permatasari menjelaskan substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sesuai peran BUMDes. Sehingga pemerintah dan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes demi kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai suatu usaha ekonomi kerakyatan, BUMDes tidak serta merta menjelma menjadi sebuah badan usaha ekonomis yang menguntungkan (Permatasari and Imaniar 2022). Sehingga berdasarkan penelitian itu dibutuhkan upaya yang

maksimal dalam meningkatkan konsistensi untuk pengelolaan BUMDes Malaluwilin, terutama kepada pengurus yang telah dilegaskan secara langsung oleh pemerintah Kampung Teluk Dore yang akan dilihat pada tahun tahun yang akan datang.

Peran BUMDes dalam perekonomian masyarakat Kampung Teluk Dore

Tujuan didirikannya BUMDes adalah sebagai penyedia pelayanan umum bagi masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat sehingga mampu tercipta suasana kemungkinan adanya potensi masyarakat dapat berkembang. BUMDes Malaluwilin seyogyanya telah berkontribusi memberikan peranan dalam mensejahterakan masyarakat Kampung Teluk Dore melalui peranan ekonomi yaitu bisnis bahan pokok, seperti sembilan bahan pokok, sayuran, daging dan ikan, serta alat pecah belah dan alat perbengkelan. BUMDes ini telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga tidak perlu jauh lagi ke distrik dan ibu kota kabupaten. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Teluk Dore yang mengatakan bahwa BUMDes

Malaluwilin telah memiliki peran dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa meskipun dalam skala kecil karena yang direkrut untuk bekerja hanya beberapa orang saja. Untuk mengelolah toko diperlukan tenaga kerja dari masyarakat untuk mengerjakannya.

Selanjutnya BUMDes Malaluwilin tidak hanya berperan terhadap masyarakat tetapi juga dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari wawancara bendahara BUMDes hasil usaha menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dikelola untuk menjadi modal usaha kembali serta biaya operasional. Tetapi setelah ditelusuri tidak ada system pelaporan yang akuntabel. Berdasarkan hal tersebut system pengelolaan yang tidak professional dimana pengurus tidak memiliki pelaporan yang detail terhadap omzet, biaya operasional dan keuntungan yang di dapat. Sesungguhnya usaha ini hanya seputar pemenuhan bahan pokok maka pendapatan dan keuntungan seharusnya tercatat pada buku laporan keuangan, tetapi faktanya tidak terjadi pengelolaan yang optimal. Jika pengelolaan BUMDes ini optimal

seharusnya pengelolaannya dapat berdampak positif bagi masyarakat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Zamzami yang mengatakan Akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan BUMDes karena proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan telah dilaporkan dengan baik melalui penyampaian tertulis kepada pemerintah desa. Dalam laporan tersebut, diberitakan tentang pengembangan dan kemajuan hasil usaha (Zamzami Zamzami and Rina Maulina 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas BUMDes Malaluwilin dalam kesejahteraan masyarakat sudah berperan baik, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal masih diperlukan inovasi dalam kegiatan usahanya supaya menarik masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan usaha desa ini. Manfaat keberadaan BUMDes Malaluwilin ini belum dirasakan masyarakat luas secara langsung hanya beberapa masyarakat saja. Dan juga dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan asli desa masih

belum dilakukan dengan maksimal. Dalam penelitian Darmin Hasirun menjelaskan penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dalam memanfaatkan belum maksimal karena pengurus BUMDes belum mencukupi dari segi jumlah karena banyaknya potensi desa yang belum digarap dengan baik sehingga menjadi tugas dari pemerintah desa, pengurus BUMDes maupun masyarakat desa agar saling bahu membahu membangun desa demi kepentingan masyarakat desa (Hasirun 2020).

Masalah BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Kampung Teluk Dore

Peran BUMDes Malaluwilin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Teluk Dore memiliki masalah yang disebabkan sumber daya manusia yang ada masih terbatas serta masih minimnya partisipasi masyarakat dalam mengelolanya. Sumber daya manusia menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam organisasi pemerintahan desa. Menurut ketua BUMDes dalam pelaksanaan usaha sulit untuk mencari masyarakat yang ingin mengelola usaha

desa dan masih rendahnya tenaga ahli dalam berwirausaha sehingga kinerja belum efektif dalam pengelolaan usahanya. Permasalahan kedua yaitu kapasitas manajerial masih rendah dalam pengelolaan BUMDes terutama mengenai hal keuangan. Dalam pencatatan laporan keuangan pengelola BUMDes Malaluwilin masih dilakukan secara sederhana, belum menggunakan aplikasi keuangan dan teknologi. Pengelola belum mendapat pendampingan mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi secara umum. Padahal laporan keuangan berperan penting dalam pengelolaan karena dapat digunakan sebagai tolak ukur peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa.

Pengelola dalam pelaksanaan usaha desa ini memerlukan peningkatan kapasitas manajerial yang profesionali agar usaha dapat berkembang dengan baik. Kendala selanjutnya adalah keterbatasan pemodalan menurut ketua BUMDes mengatakan dalam mengembangkan usaha diperlukan modal yang tidak sedikit. Pada BUMDes Malaluwilin diketahui modal awal sebesar Rp.

210.000.000 telah dibelanjakan untuk pembelian barang, kemudian untuk saat ini BUMDes belum mendapatkan modal dari dana desa karena pemerintah masih memprioritaskan pembangunan fisik desa. Kampung Teluk Dore memiliki potensi alam yang besar yaitu terdapat air terjun dan hutan serta pantai yang dapat dikembangkan untuk wisata namun karena modal yang dimiliki masih minim potensi tersebut belum dimanfaatkan. Hal ini karena modal untuk pengelolaan hanya mengandalkan dana desa saja, belum ada bantuan dari pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan potensi usaha yang dilakukan.

Selanjutnya masalah yang dihadapi adalah belum terlaksananya pelatihan pada masyarakat yang dapat meningkatkan kreatifitas sehingga mendorong perkembangan usaha. Pengurus BUMDes Malaluwilin belum dilatih secara khusus dalam mengelola usaha secara profesional yang dapat meningkatkan keuntungan usaha. Jika pelatihan telah dilakukan maka akan meningkat kinerja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Suranta yang mengatakan solusi yang ditawarkan dalam menghadapi masalah

optimalisasi BUMDes adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik pelatihan pengembangan usaha BUMDes dan pelatihan kerjasama usaha BUMDes dengan UMKM, maupun pelatihan pemasaran jasa/produk BUMDes dan UMKM (Suranta et al. 2022). Hal ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Kampung jika BUMDes ini akan dikembangkan pada tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat bertahan.

Optimalisasi BUMDes dalam Mensejahterakan Masyarakat Kampung Teluk Dore

BUMDes Malaluwilin dalam mensejahterakan masyarakat sudah berperan dengan cukup baik, namun pengelolaannya belum dilakukan secara optimal dilihat dari perkembangan usaha yang masih lambat. Sehingga untuk mengoptimalkan perannya memerlukan beberapa upaya agar manfaat keberadaan usaha milik desa ini dapat dirasakan merata oleh masyarakat desa. Berdasarkan wawancara ketua BUMDes upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kampung seharusnya memberikan

sosialisasi tentang pengelolaan BUMDes terhadap pengurus untuk meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan dalam mengelola usaha milik kampung. Namun hal itu tidak terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia yang terbatas serta kurang minatnya masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes, yang harus diakui bahwa BUMDes ini pada tahap awal dan dibutuhkan usaha maksimal untuk mengelolanya.

Selanjutnya upaya optimalisasi dengan diadakan pendampingan dan pelatihan terhadap pengelola serta masyarakat desa juga untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan terutama Sumber Daya Manusia yang masih rendah mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes Malaluwilin agar usaha milik desa dapat dijalankan secara maksimal dan juga demi keberlanjutan usaha desa. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kampung Teluk Dore mengatakan pendampingan dan pelatihan itu belum terlaksana selama BUMDes terbentuk sehingga membuat manajerial dan tata kelola BUMDes tidak optimal dan menciptakan konflik dalam

pengurusnya yang dapat dilihat sekarang di Kampung Teluk Dore dimana BUMDesnya tidak berjalan secara maksimal. Selain itu juga untuk dalam menggali potensi alam Kampung Teluk Dore perlu dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga dengan pelatihan dan pendampingan tersebut diharapkan mampu membangun kreatifitas, inovasi serta profesionalitas dalam pengelolaan BUMDes. Karena dengan tata kelola yang baik dalam organisasi dapat mengoptimalkan peranan BUMDes Malaluwilin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iit Novita Riyanti untuk mengoptimalkan peran BUMDes Singajaya dalam mensejahterakan masyarakat desa Bodas maka perlu dilakukan beberapa kegiatan, yaitu dengan mengadakan sosialisasi serta pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kreatifitas, inovasi serta profesionalitas dalam pengelolaan BUMDes Singajaya dan juga untuk menggali potensi desa yang ada (Novita Riyanti and Hermawan Adinugraha 2021). Sehingga

berdasarkan hal tersebut disimpulkan dalam optimalisasi BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat Kampung Teluk Dore perlu mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas terutama pada pengurus BUMDes sehingga outputnya dapat berkinerja maksimal dalam upayanya mensejahterakan masyarakat. Dalam lingkup usaha, seharusnya BUMDes juga perlu mengelola usaha lainnya dan melihat potensi alam Kampung Teluk Dore yang belum dikelola secara maksimal.

SIMPULAN

Pembentukan BUMDes Malaluwilin telah diatur dalam peraturan Kampung Teluk Dore pada tahun 2022 yang bertujuan sebagai penyedia pelayanan umum bagi masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat sehingga mampu tercipta suasana kemungkinan adanya potensi masyarakat dapat berkembang. Namun keberadaan BUMDES Malaluwilin saat ini tidak optimal karena terkendala modal dan sumber daya manusia yang dirasa masih belum mampu mengelola BUMDes, yang terbukti pada tidak beroperasinya lagi kegiatan yang seharusnya secara terus menerus

dilakukan. Kendala yang dihadapi oleh BUMDes adalah tidak ada system pelaporan yang akuntabel sehingga pengelolaan yang tidak professional dimana pengurus tidak memiliki pelaporan yang detail terhadap omzet, biaya operasional dan keuntungan yang di dapat sehingga dalam pelaksanaan usaha desa ini memerlukan peningkatan kapasitas manajerial yang profesionali agar usaha dapat berkembang dengan baik serta belum terlaksananya pelatihan pada masyarakat yang dapat meningkatkan kreatifitas sehingga mendorong perkembangan usaha.

Dalam kesejahteraan masyarakat sudah berperan baik, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal masih diperlukan inovasi dalam kegiatan usahanya supaya menarik masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan usaha desa ini. Manfaat keberadaan BUMDes Malaluwilin ini belum dirasakan masyarakat luas secara langsung hanya beberapa masyarakat saja. Dan juga dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan asli desa masih belum dilakukan dengan maksimal. Pada penelitian selanjutnya yang

menjadi menarik untuk dikembangkan operasionalisasi variable optimalisasi yang secara spesifik menjelaskan prosesnya serta akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes yang secara sistematis dan professional dengan pendekatan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Rineka Cipta Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta.
- BPS Kabupaten Sorong. 2022. "Kabupaten Sorong Dalam Angka 2022."
- Hasirun, Darmin Bone. 2020. "Optimalisasi Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan Potensi Desa (Studi Pada Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan)." *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan* 3(1): 7-22.
- Lukmawati, Andriyana, Anggraeny Puspaningtyas, and Achluddin Ibnu Rochim. 2020. "Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas Dan BUMDes Desa



- Sumberpitu Kecamatan Cepu , Kabupaten Blora).” *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik UNTAG Surabaya* (6): 69–72.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Novita Riyanti, and Hendri Hermawan Adinugraha. 2021. “Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul).” *Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2(1): 80–93.
- Nurhayati, Cucu et al. 2018. “Masyarakat Desa.” www.intranspublishing.com.
- Pemerintah RI. 2016. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2(1): 45–54.
- Permatasari, Safrieta Jatu, and Dimas Imaniar. 2022. “Optimalisasi Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa (Studi Pada Bumdes Ijen Lestari, Desa Tamansari, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi).” *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13(1): 9.
- Sugiyono. 2012. Alfabeta *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung.
- Suranta, Sri, Ari Kuncara Widagdo, Renata Zoraifi, and Sulardi Sulardi. 2022. “Optimalisasi Pemasaran BUMDes ‘Lestari Jaya’ Dan UMKM Desa Sanggung Gatak Sukoharjo Untuk Meningkatkan Omzet Di Masa Pandemi.” *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara* 6(2): 357–64.
- Zamzami Zamzami, and Rina Maulina. 2023. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dan Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).” *Akuntansi dan Teknologi Informasi* 16(1): 16–29.